

BAB 6 : PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis implementasi pelayanan *antenatal care* di wilayah kerja Puskesmas Seberang Padang dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Unsur Input

1. Kebijakan dan SOP

Kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelayanan ANC yaitu Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Petugas sudah mengetahui tentang indikator dalam pelayanan ANC. Sosialisasi terkait kebijakan dan indikator juga sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Puskesmas sudah memiliki SOP terkait pelayanan ANC. Namun adanya perbedaan persepsi dari petugas terhadap target capaian pelayanan ANC di Puskesmas.

2. Sumber Daya Manusia

Puskesmas Seberang Padang sudah mencukupi standar tenaga kesehatan yang telah ditetapkan, baik dari kuantitasnya maupun dari kompetensi petugas.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Puskesmas Seberang Padang dalam pelayanan ANC sudah tersedia, namun tidak terdapat alat ukur tinggi badan di ruang poli KIA ibu.

4. Dana

Dana untuk pelayanan ANC sudah mencukupi yaitu bersumber dari dana DAK non fisik yaitu BOK, dan dana BLUD yaitu JKN.

Unsur Proses

1. Pendataan

Pendataan sudah dilakukan di Puskesmas Seberang Padang oleh bidan Pembina wilayah dengan bantuan kader setiap awal tahun hingga akhir tahun. Namun jumlah target yang ditetapkan dari Dinas Kesehatan lebih tinggi dari kondisi riil di lapangan karena masih banyak masyarakat yang tidak terjangkau berdasarkan target/sasaran di Puskesmas, ibu hamil juga banyak melakukan pemeriksaan di FKTP selain Puskesmas, namun data laporan pemeriksaan ibu hamil dari FKTP lain tersebut tidak ada, serta pemantauan yang dilakukan Puskesmas terhadap ibu hamil juga belum maksimal.

2. Pelayanan 10T

Pelayanan 10T sudah dilakukan di Puskesmas sesuai SOP namun belum maksimal seperti pengukuran tinggi badan tidak selalu dilakukan, rendahnya pemberian TTD dan konsumsi TTD oleh ibu hamil, serta banyak ibu hamil yang tidak mau melakukan pemeriksaan laboratorium.

3. Pencatatan dan Pelaporan

Puskesmas Seberang Padang sudah melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pelayanan ANC. Pencatatan dilakukan pada kartu Ibu/e-puskesmas, buku KIA, buku registrar, kohort manual dan kohort elektronik (e-kohort). Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan PWS-KIA dan LB3 Ibu yang dilakukan setiap bulan oleh bidan pembina wilayah dan pemegang program Ibu. Kendala dalam

pencatatan dan pelaporan yaitu belum adanya laporan dari jejaring di sekitar Puskesmas Seberang Padang terkait ibu hamil yang melakukan kunjungan.

Unsur Output

Cakupan pelayanan ANC di Puskesmas seberang padang belum mencapai target 100%. Kendalanya yaitu jumlah target sasaran yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran ibu hamil yang ditemukan di lapangan. Selain itu, kondisi penduduk yang sering berpindah-pindah sehingga tidak melanjutkan pemeriksaan di Puskesmas, yang menyebabkan pencatatan yang dilakukan tidak maksimal. Pemantauan terhadap ibu hamil juga belum dilakukan maksimal.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan

1. Perlu dilakukan sosialisasi kembali kepada petugas pelayanan ANC di Dinkes dan Puskesmas terkait indikator dan target capaian pelayanan ANC serta membangun komunikasi yang lebih baik sesama petugas agar tidak terjadinya salah persepsi terhadap target capaian di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan Kota Padang.
2. Perlu adanya sinkronisasi terhadap penentuan sasaran dari semua program terkait ibu hamil, misalnya dengan imunisasi, P2P, dan sebagainya agar target pelayanan ANC tercapai.

6.2.2 Bagi Puskesmas

1. Puskesmas segera melengkapi alat pengukuran tinggi badan di ruang poli KIA Ibu agar pelayanan 10T di Puskesmas dapat dilakukan dengan maksimal.

2. Perlu maksimalkan pemantauan Puskesmas terkait ibu hamil dengan memaksimalkan para kader yang ada sehingga seluruh sasaran ibu hamil dapat terpantau dengan baik.
3. Perlu adanya sosialisasi kembali kepada ibu hamil khususnya dalam mengisi kartu kontrol konsumsi tablet tambah darah di buku KIA dan pentingnya melakukan pemeriksaan labor di awal kehamilan untuk mendeteksi dini komplikasi kebidanan.
4. Sebaiknya Puskesmas mengusulkan kepada Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi aplikasi e-kohort agar tidak terjadinya permasalahan seperti eror atau server down.
5. Sebaiknya Puskesmas membuat kebijakan tentang kewajiban petugas dalam mengisi kohort ketika selesai pelayanan, agar tidak terjadinya keterlambatan dalam pengiriman data kepada Dinas Kesehatan.
6. Perlu meningkatkan koordinasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) selain Puskesmas terkait pencatatan dan pelaporan kunjungan ibu hamil dengan cara memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen, agar cakupan pelayanan ANC di Puskesmas Seberang Padang dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.